



Wali Kota Rai Mantra Sampaikan Ranperda Perubahan APBD 2016

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2016 setelah perubahan dirancang Rp 2,05 triliun lebih. Nilai ini mengalami peningkatan Rp 38,70 miliar lebih dibandingkan anggaran induk Rp 2,01 triliun lebih. Hal tersebut dikemukakan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 dalam rapat Paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (18/7) kemarin di ruang pertemuan Gedung Sewaka Dharma, Denpasar.

Wali Kota menjelaskan, sejumlah pos pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah dirancang meningkat Rp 24,91 miliar lebih dari anggaran induk Rp 715,45 miliar lebih sehingga target Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan menjadi Rp 740 miliar lebih. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dirancang Rp 1,081 triliun lebih, mengalami penurunan Rp 5,66 miliar lebih dari anggaran induk Rp 1,987 triliun lebih. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi, dirancang Rp 230,75 miliar lebih, meningkat Rp 19,45 miliar lebih dari anggaran induk Rp 211,30 miliar lebih.

Dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, direncanakan Rp 2,26 triliun lebih, meningkat Rp 143,76 miliar lebih dibandingkan anggaran induk Rp 2,12 triliun lebih. Wali Kota Rai Mantra juga menjelaskan, belanja tidak langsung tersebut tidak hanya untuk belanja pegawai, tetapi juga untuk belanja hibah,

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dirancang Rp 1,26 triliun lebih, mengalami peningkatan Rp 20,41 miliar lebih dibandingkan anggaran induk Rp 1,24 triliun lebih.

Demikian juga untuk belanja hibah dalam mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, dirancang Rp 53,09 miliar lebih. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp 19 miliar dari anggaran induk Rp 34,09 miliar lebih. Sedangkan untuk belanja pada anggaran perubahan tersebut, dirancang menurun Rp 6,07 miliar lebih dari anggaran induk Rp 991,17 miliar lebih menjadi Rp 985,09 miliar lebih.

Untuk belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, dirancang meningkat Rp 123,35 miliar lebih sehingga menjadi Rp 1,00 triliun dari anggaran induk Rp



PENGANTAR - Wali Kota Rai Mantra menyampaikan pidato pengantar Ranperda tentang perubahan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 dalam rapat Paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (18/7) kemarin di ruang pertemuan Gedung Sewaka Dharma, Denpasar.

884,94 miliar lebih. Di akhir penyampaian pidatonya, Rai Mantra berharap ada koreksi yang konstruktif sehingga apa

yang dirumuskan akan memberi hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan di Kota Denpasar. (ad520)

Edisi : Selasa, 19 Juli 2016

Hal : 2



Seleksi Paskibraka Sedot Anggaran Rp 533 Juta

Bangli (Bali Post) –

Kegiatan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) untuk upacara peringatan Kemerdekaan RI di Kabupaten Bangli setiap tahunnya selalu menyedot anggaran hingga Rp 500 juta. Anggaran tersebut dipakai untuk biaya konsumsi, pembelian seragam, dan keperluan lainnya selama kurang lebih sebulan.

Kasubag Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Setda Bangli Nengah Karya Atmaja, Senin (18/7) kemarin mengatakan, untuk kegiatan seleksi dan latihan paskibraka tahun ini pihaknya menganggarkan dana Rp 533 juta. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan paskibraka mulai dari konsumsi, pembelian seragam, pelatihan, pembekalan dan keperluan lainnya.

"Pada tahun lalu kita anggar-kan Rp 500 juta di APBD Induk dan Rp 150 juta di perubahan," terangnya.

Menurut Karya Atmaja, jika dibandingkan dengan kabupaten lain, dana yang dianggarkan Pemkab Bangli untuk kegiatan seleksi dan pelatihan Paskibraka selama ini masih tergolong

minim. Di kabupaten lain, dana yang dianggarkan untuk kegiatan Paskibraka bisa mencapai Rp 1 miliar lebih.

Lebih lanjut dikatakannya, karena minimnya anggaran, Pemkab Bangli selama ini hanya bisa merekrut anggota paskibraka sebanyak 40 orang. Padahal idealnya jumlah anggota paskibraka yang dibutuhkan untuk kegiatan upacara HUT Kemerdekaan RI sebanyak Rp 80 orang.

Karena jumlah pasukan masih kurang dari jumlah yang seharusnya, dalam setiap upacara HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Bangli menyiasatinya dengan menambah personel yang diambil dari purna paskibraka tahun sebelumnya. "Jadi setiap anggota Paskibraka dapat kesempatan dua kali ikut upacara HUT

Kemerdekaan," terangnya.

Para anggota paskibraka yang direkrut tersebut berasal dari kalangan pelajar SMA/SMK. Proses seleksi anggota paskibraka dilaksanakan 4 sampai 14 Juli lalu. Mulai 27 Juli mendatang, para pelajar yang direkrut sebagai anggota paskibraka akan diberikan berbagai macam pelatihan dan pembekalan di antaranya latihan dasar baris berbaris, wawasan kebangsaan, bela negara, dan lainnya. Untuk memberikan pelatihan baris berbaris Pemkab Bangli melibatkan Kodim dan Polres. Demikian juga dengan pembekalan lainnya, Pemkab Bangli menggandeng sejumlah instansi terkait. "Para anggota paskibraka juga nanti akan menjalani masa karantina," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Selasa 19 Juli 2016.

Hal : 8



Bali Post/ist

DILELANG - Sejumlah kendaraan dinas Pemkab Badung yang tak terpakai dikumpulkan sebelum dilelang.

Ratusan Motor Tua Dilelang

Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mulai melakukan inventarisasi aset mangkrak. Termasuk, ratusan kendaraan dinas jenis sepeda motor yang saat ini berada *basement* pemkab setempat. Rencananya, lelang terhadap sepeda motor dinas tidak layak pakai ini bakal dilakukan Agustus mendatang.

Kabag Aset Setda Badung I Wayan Puja mengatakan, aset yang masih bernilai akan dilakukan pelelangan secara terbuka. Berbagai jenis kendaraan roda dua dari tahun 1984 hingga tahun 1994 itu, sesuai rencana akan dilakukan lelang pada Agus-

tus mendatang. "Kami tengah melakukan pendataan dan penilai atas aset-aset tersebut untuk dihapuskan dan lelang. Ya... dikumpulkan untuk memudahkan pemantauan," ungkap Puja saat dimintai konfirmasi, Senin (18/7) kemarin.

Menurutnya, aset-aset tersebut terlebih dahulu akan dilakukan penilaian. Penilaian ini guna menentukan harga dasar sesuai dengan nilai publik dan nilai pemerintah. "Prosesnya dilakukan penilaian terlebih dahulu, yang masih bernilai akan dilakukan lelang," katanya.

Dijelaskannya, untuk menentukan nilai aset tersebut, pihaknya bekerja sama

dengan pejabat berwenang yakni DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). "Setelah dilakukan penilaian, baru dilakukan lelang secara umum," ucapnya.

Beberapa aset telah dilakukan penilaian untuk selanjutnya dilakukan lelang secara bertahap. Sayangnya, ia tidak menyebutkan beberapa item aset yang akan dihapuskan dan yang akan dilelang. "Jumlah itemnya saya tidak detail tahu, tapi yang jelas roda dua, roda empat dan inventaris. Agustus atau September yang sudah dilakukan penilaian (dilelang-red). Dan tahapan berikutnya setelah dilakukan penilaian tahap berikutnya," ujarnya. (kmb27)

Edisi : Selasa, 19 Juli 2016.
Hal : 3



Pemkot Tetap Kelola SMA/SMK

Denpasar (Bali Post) –

Simpang siur pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, terjawab sudah. Menyusul, Pemkot Denpasar sudah menerima surat terkait penundaan pelimpahan kewenangan pengelolaan sekolah tingkat menengah atas tersebut. Bahkan, Pemkot Denpasar sudah siap untuk tetap mengelola SMA/SMK tersebut.

Hal ini ditegaskan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra yang ditemui usai sidang paripurna DPRD, Senin (18/7) kemarin di Graha Sewaka Dharma, Lumintang. Wali Kota Rai Mantra mengatakan, pihaknya sudah pasti tetap akan mengelola SMA/SMK tersebut karena sudah menerima pemberitahuan. "Kita tetap kelola itu (SMA/

SMK) karena ada gugatan dari Surabaya (Wali Kota Surabaya) atas rencana pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK itu," katanya.

Terkait masalah anggaran, Wali Kota yang didampingi Sekda Kota Denpasar A.A. Rai Iswara dan Kepala Bappeda I.B. Subrata mengaku tidak ada masalah. Karena, dana pengelolaan sekolah terse-

but juga sudah dianggarkan. "Kami sudah pasang anggaran sekitar Rp 11 sampai Rp 12 miliar untuk pengelolaan sekolah itu," ujar Rai Iswara menambahkan.

Namun, imbuhnya, dana itu belum termasuk gaji guru. Dana sebesar itu hanya untuk pengelolaan atau operasional sekolah. Gaji guru ada di pos yang berbeda. "Jadi, kami

sudah siap untuk mengelola SMA/SMK," kata Rai Iswara.

Merujuk pada amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah merencanakan adanya peralihan kewenangan dalam mengelola SMA/SMK. Dalam UU tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Peralihan pengelolaan didasarkan pada Undang-Undang nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota, hanya menangani Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). (kmb12)

Edisi : Selasa, 19 Juli 2016.

Hal : 2.



Jatah ADD Menurun

62 Desa di Buleleng Tunda Program Pembangunan

Singaraja (Bali Post) -

Penurunan jatah Alokai Dana Desa (ADD) dalam APBD Perubahan tahun ini menimbulkan dampak serius. Program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKP terpaksa dipending dan dialihkan ke tahun 2017 mendatang. Langkah ini diambil oleh puluhan desa yang menerima jatah ADD turun dari anggaran APBD Induk 2016.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara kecamatan, pengurus Forum Komunikasi Perbekel (Forkomdes) Kecamatan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Buleleng Senin (18/7) kemarin. Pertemuan ini dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) Putu Meles mewakili Kepala BPM-PD Gede Sandhiyasa. Pertemuan ini sengaja dilakukan untuk menyampaikan aspirasi desa-desa yang jatah ADD mereka dipangkas. Dari pertemuan kemarin diputuskan bahwa tercatat 62 desa yang jatah ADD-nya dipangkas itu menerima kebijakan itu dengan resiko program yang sudah disusun terpaksa dialihkan ke tahun 2017 mendatang.

Ketua Forkomdes Kabupaten Buleleng Made Suteja mengatakan, kebijakan pengurangan jatah ADD kepada 62 desa dalam APBD Perubahan tahun ini menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah kabupaten. Apalagi, BPM-PD dan instansi terkait yang menjadi atasan desa belum melakukan sosialisasi sebelum kebijakan itu digulirkan. Mencegah agar kondisi ini tidak menjadi polemik berkepanjangan, pihaknya kemudian mengambil inisiatif untuk meminta penjelasan secara mendetail kepada BPM-PD dan instansi terkait. "Bisa dibilang teman-teman perbekel yang ADD-turu kecewa dengan kebijakan itu. Apalagi tidak ada sosialisasi dan kucuran ADD dipangkas begitu saja,"

katanya..

Menurut Suteja, dari pertemuan itu pengurangan ADD untuk 62 desa itu karena perubahan Peraturan Bupati (Perbup) No. 106 Tahun 2016 menjadi No. 403 Tahun 2016 tentang perubahan alokasi keuangan pemerintahan desa. Dasar perubahan perbup ini karena adanya petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali agar indikator kucuran ADD dari semua memakai acuan data kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diganti menggunakan data kemiskinan hasil pendataan kabupaten sendiri. Dengan kondisi ini, perbekel yang jatah ADD-nya turun itu kini bisa menerima walaupun dengan resiko program yang sudah mereka susun dalam RPJMDes dan RKP banyak yang mandeg dan dialihkan dalam tahun berikutnya. "Setelah kami adakan pertemuan persosalannya sudah selesai dan perbekel yang jatah ADD-nya turun itu juga menerima pengurangan jatah dengan resiko program tidak bisa berjalan menunggu kucuran ADD tahun berikutnya," jelasnya.

Sementara itu Kepala BPM-PD Gede Sandhiyasa mengatakan, ada 62 desa di Buleleng jatah ADD-nya diturunkan dibandingkan dari alokasi dana yang sama dalam APBD Induk 2016. Sementara sisanya 72 desa mendapat tambahan jatah ADD. Kebijakan ini berdasarkan petunjuk BPK Perwakilan Bali untuk merubah indikator pembagian jatah ADD dari dari awalnya memakai data kemiskinan yang diterbitkan BPS diganti dengan data kemiskinan yang didata oleh kabupaten. Perubahan acuan ini kemudian diikuti dengan merubah perbup. Dampak penurunan ini desa harus menunda program yang sudah disusun dalam RPJMDes dan RKP. Untuk itu penundaan program itu diharapkan memakai pertimbangan skala prioritas, sehingga meski desa menda-

pat jatah ADD turun namun program yang tergolong urgen tetap dapat direalisasikan. "Kebijakan ini karena petunjuk BPK Perwakilan Bali dan sejatinya secara keseluruhan total ADD untuk seluruh desa itu tetap dan hanya perubahan pola bagiannya yang dirubah," tegasnya. (kmb38)

Edisi : Selasa, 19 Juli 2016

Hal : 11